

"BPJS Kesehatan Mendengar" Kelompok Pakar Soroti Penguatan Pelayanan Primer

Jakarta (09/03/2021) – Kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, banyak menyoroti optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan pertama atau primer. Menurut Guru Besar FKM Universitas Indonesia, Profesor Budi Hidayat, hanya 18% biaya JKN untuk pembiayaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Saat ini juga perlu adanya evaluasi pada benefit atau manfaat di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dilanjutkan melakukan *costing* dan *pricing* tarif layanan kesehatan sebagai input dalam perhitungan kapitasi, serta upaya perluasan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Diharapkan persentase pembiayaan di layanan tingkat pertama bisa mencapai 30-40% dari total pembiayaan JKN,” kata Budi Hidayat.

Diharapkan lanjut Budi Hidayat, dengan kuatnya pembiayaan JKN di sektor pelayanan primer khususnya promotif dan preventif serta meningkatkan benefit manfaat pelayanan kesehatan lainnya di FKTP, maka akan berpengaruh pada biaya layanan di tingkat rujukan/lanjutan.

Hal serupa terkait penguatan FKTP juga diamini oleh beberapa pakar kesehatan masyarakat seperti Dr. Setiawan dari Universitas Padjajaran. Menurutnya perlu adanya kolaborasi kelembagaan untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif, serta adanya *reward and punishment* terhadap peserta yang berupaya dalam hal menjaga kesehatan individu.

“Hal ini bisa dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kemendikbud, bagaimana membangun edukasi promosi kesehatan yang secara sistemik dan membangun kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan,” ujar Setiawan.

Sementara itu penguatan di FKTP juga bisa dioptimalkan dalam hal layanan penyakit kronis, paliatif, melalui pelayanan telekonsultasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Julita Hendrartini dari Universitas Gadjah Mada. Pemberdayaan layanan primer juga perlu dilakukan khususnya dalam hal layanan persalinan. Profesor Ova Emilia dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan perlu adanya pembatasan jumlah persalinan dengan optimalisasi program KB, sehingga akan menurunkan jumlah persalinan *sectio caesaria* (SC).

Sementara itu beberapa Pakar juga memberikan masukan terkait dengan upaya menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS. Profesor Ascobat Gani dari FKM Universitas Indonesia mengungkapkan, Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian terhadap paket layanan, sebagai tindak lanjut dari Perpres 64/2020. Dimulai dari penerapan kelas standar serta pendefinisian Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), percepatan penyelesaian standar pelayanan, dan penerapan urun biaya.

Pakar Jaminan Sosial Chazali Situmorang juga menyoroti, bahwa perlunya BPJS Kesehatan menjaga sustainabilitas program dengan mulai membentuk dana cadangan teknis sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari sisi pengelolaan data yang ada dalam Program JKN-KIS, Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan periode 2016-2019 mengungkapkan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan misalnya Dukcapil Kemendagri dan DTKS Kementerian Sosial, untuk melakukan pembaruan data yang berkelanjutan, serta memastikan keterpadanannya.

“Jika memungkinkan diharapkan adanya proses pembaruan data dari bawah ke atas, bukan hanya atas ke bawah yang selama ini dilakukan. Diharapkan adanya *feedback* data ini semakin meningkatkan akurasi data serta pemanfaatan data ini dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti penanggulangan Covid-19. Peran Jaminan Kesehatan harus diakui di masa pandemi ini akan semakin besar,” tambah Yanuar.

Dalam sesi “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, narasumber lain yang hadir dari berbagai perguruan tinggi. Seperti Profesor Hasbullah Thabrany dari Universitas Indonesia, Dr. Chriswardani dari Universitas Diponegoro, Profesor Ni Nyoman Tri Puspaningsih dari Universitas Airlangga, Dr. Jack Roebijoso dari Universitas Brawijaya, dr. Putu Agus Parta Wirawan Konsultan Kebijakan Kesehatan, Dr. Ede Surya Darmawan dari IAKMI.

Selain itu juga hadir, serta tokoh-tokoh jaminan sosial lainnya seperti Profesor Laksono Trisnantoro dari UGM, Profesor Alimin Maidin dari Universitas Hasanuddin, Ahmad Anshori, Prastuti Soewondo, Donald Pardede, Suko Widodo, dan Supriyantoro.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengapresiasi kontribusi para pakar dan tokoh jaminan sosial ini dalam memberikan gagasan, masukan serta evaluasi yang telah disampaikan.

“Kami harapkan komunikasi ini akan tetap terjalin dan terus berkesinambungan, gagasan dan evaluasi yang berharga ini akan kami telaah dan analisa lebih dalam sebagai upaya perbaikan Program JKN-KIS ke depan,” kata Ghufron.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Care Center : 1 500400

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Expert Group Highlights Strengthening of Primary Services in "BPJS Kesehatan Mendengar" Program

Jakarta (09/03/2021) - The Expert Group's "BPJS Kesehatan Mendengar" (*trans: BPJS Kesehatan Listens*) activity focuses a lot on the optimization of health services at the first or primary level of service. According to the Professor of Faculty of Public Health, University of Indonesia, Professor Budi Hidayat, only 18% of JKN costs are for financing the First Level Health Facility (FKTP).

"Currently, there is also a need for an evaluation of the benefits in first-level health services. Then continue with costing and pricing of health service rates as input in calculating capitation, as well as efforts to expand Performance-Based Capitation (KBK). It is expected that the percentage of financing in first-level services can reach 30-40% of the total JKN financing," said Budi Hidayat.

Budi Hidayat hoped that with the strong JKN financing in the primary service sector, especially promotive and preventive as well as increasing the benefits of other health services at FKTP, it will affect service costs at the referral/advanced level.

A number of public health experts such as Dr. Setiawan from Padjadjaran University said that there is a need for institutional collaboration to increase promotive and preventive efforts, as well as reward and punishment for participants who make efforts in maintaining their individual health.

"It can be done by collaborating with relevant stakeholders such as the Ministry of Education and Culture, to build systemic health promotion education and build awareness of the importance of health insurance," said Setiawan.

Meanwhile, strengthening in FKTP can also be optimized in terms of giving chronic and palliative disease services through teleconsultation. This was disclosed by Dr. Julita Hendrartini from Gadjah Mada University. Empowerment of primary services also needs to be done, especially in terms of childbirth services. Professor Ova Emilia from Gadjah Mada University revealed that there is a need to limit the number of deliveries by optimizing the family planning program, so it will reduce the number of cesarean section (SC) deliveries.

Meanwhile, several experts also provided input regarding efforts to maintain the sustainability of the JKN-KIS Program. Professor Ascobat Gani from Faculty of Public Health of University of Indonesia revealed that the government needs to immediately make adjustments to the service package, as a follow-up to Perpres 64/2020. Starting from the application of standard classes and defining Basic Health Needs (KDK), accelerating the completion of service standards, and implementing cost sharing.

Social Security expert Chazali Situmorang also highlighted the need for BPJS Kesehatan to maintain the sustainability of the program by starting to establish a technical reserved fund in accordance with the mandate of the law.

In terms of data management in the JKN-KIS Program, Yanuar Nugroho, Deputy Head of Presidential Staff for the 2016-2019 period revealed the need for collaboration between stakeholders, such as the Dukcapil of the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Social Affairs' DTKS, to carry out continuous data updating, as well as ensuring compatibility.

"If possible, hopefully there will be a data updating process from the bottom up, not just the top down, which has been done so far. It is hoped that this data feedback will further improve the accuracy of the data and this data can be used for other things such as the response to Covid-19. The role of health insurance during this pandemic is even greater," added Yanuar.

In "BPJS Kesehatan Mendengar" session with the Expert Group, other sources were present from various universities. Like Professor Hasbullah Thabrany from the University of Indonesia, Dr. Chriswardani from Diponegoro University, Professor Ni Nyoman Tri Puspaningsih from Airlangga University, Dr. Jack Roebijoso from Brawijaya University, dr. Putu Agus Parta Wirawan Health Policy Consultant, Dr. Ede Surya Darmawan from IAKMI.

In addition, there were also other social security figures such as Professor Laksono Trisnantoro from UGM, Professor Alimin Maidin from Hasanuddin University, Ahmad Anshori, Prastuti Soewondo, Donald Pardede, Suko Widodo, and Supriyantoro.

The President Director of BPJS Kesehatan, Ali Ghufon Mukti appreciates the contribution of these experts and social security figures in providing ideas, input and evaluations that have been submitted.

"We hope that this communication will continue. We will study and analyze these valuable ideas and evaluates the input as an effort to improve JKN-KIS program in the future," said Ghufon.